



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.993.553.209.614,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp640.843.610.647,00 (enam ratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.452.464.955,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.028.044.294,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.985.401.398,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.377.700.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.452.464.955,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp25.065.000.000,00 (dua puluh lima miliar enam puluh lima juta rupiah);
- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp80.569.306.955,00 (delapan puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp101.335.000.000,00 (seratus satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 60.806.033.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 6

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.028.044.294,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp303.312.389.020,00 (tiga ratus tiga miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp916.745.028,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp7.798.910.246,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

#### Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.985.401.398,00 (dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp12.485.401.398,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.377.700.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp1.018.000.000,00 (satu miliar delapan belas juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp420.700.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- h. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp303.312.389.020,00 (tiga ratus tiga miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp294.212.878.520,00 (dua ratus Sembilan puluh empat miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direncanakan sebesar Rp2.099.510.500,00 (dua miliar Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- d. Retribusi Pelayanan Pasar direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



#### Pasal 10

Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp916.745.028,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp742.042.028,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah);
- b. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah direncanakan sebesar Rp54.703.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.798.910.246,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp7.177.310.246,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah); dan
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp621.600.000,00 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.352.609.598.967,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.178.917.714.978,00 (dua triliun seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.890.849.570.978,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp273.359.772.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
  - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp14.708.372.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.691.883.989,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) adalah Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp173.691.883.989,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.039.553.209.614,00 (tiga triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.291.787.756.005,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.630.941.970,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp870.966.152.035,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.427.662.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.363.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.630.941.970,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 788.484.314.133,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp224.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar rupiah);

c. Tambahan ...

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp232.959.479.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp36.584.017.549,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.494.853.588,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp1.795.957.700,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp870.966.152.035,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp139.145.153.824,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp228.721.693.300,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp24.507.461.680,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp50.997.783.700,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp10.624.306.400,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp105.036.987.583,00 (seratus lima miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp33.383.876.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp278.548.889.548,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dialokasikan untuk Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 19

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.427.662.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp62.690.000.000,00 (enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp17.710.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- c. Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp30.199.870.000,00 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp1.854.492.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
- e. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp10.973.300.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.363.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp6.034.500.000,00 (enam miliar tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp288.977.066.609,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp7.860.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp71.230.453.732,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp111.370.531.550,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp77.407.265.150,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp17.658.616.177,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp3.450.200.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp19.100.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus juta rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp439.688.387.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp31.522.615.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp408.165.772.000,00 (empat ratus delapan miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp31.522.615.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp29.745.250.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp1.777.365.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp408.165.772.000,00 (empat ratus delapan miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar); dan
- b. Pencairan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Dan Hibah Berupa Barang/Jasa Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa.

Pasal 30

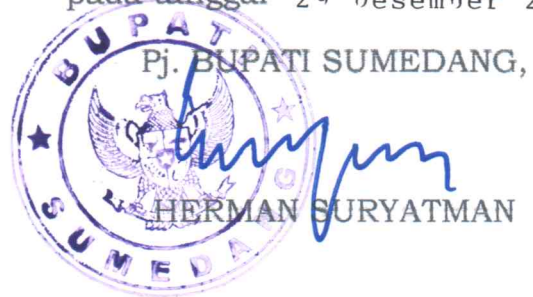
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 130



**KABUPATEN SUMEDANG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>640.843.610.647,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	297.452.464.955,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	25.065.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.077.600.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.077.600.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.933.803.600,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.933.803.600,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	8.099.701.400,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	8.099.701.400,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	53.895.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	53.895.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.900.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.900.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.800.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.937.933.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.937.933.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.767.067.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.767.067.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	95.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	95.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.450.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.157.604.500,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.157.604.500,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	271.275.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	271.275.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	10.120.500,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	10.120.500,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	80.569.306.955,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	80.569.306.955,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	80.569.306.955,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	750.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	750.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	750.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	13.800.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	13.800.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	13.800.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.875.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.536.888.402,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.536.888.402,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.338.111.598,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.338.111.598,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	101.335.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	101.335.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	101.335.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.806.033.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	60.806.033.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	60.806.033.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	312.028.044.294,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	303.312.389.020,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	294.212.878.520,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	67.687.922.922,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	226.524.955.598,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.099.510.500,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.099.510.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	15.046.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.984.954.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	916.745.028,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	742.042.028,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	318.364.528,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	85.012.500,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	100.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	138.665.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	100.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	54.703.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	27.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	27.703.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.798.910.246,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.177.310.246,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.177.310.246,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	621.600.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	621.600.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.985.401.398,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.985.401.398,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.485.401.398,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.485.401.398,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.377.700.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.018.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	18.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.000.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.000.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	420.700.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	376.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	376.000.000,00
4.1.04.03.05	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	44.700.000,00
4.1.04.03.05.0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	44.700.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	39.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	39.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	39.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	400.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.300.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.300.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.300.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	700.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.352.609.598.967,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.917.714.978,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.890.849.570.978,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	101.972.353.978,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.489.909.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	36.511.310.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	20.980.025.978,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.187.724.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.038.852.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	30.111.093.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	479.048.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.077.237.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.145.078.496.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	997.049.997.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	25.511.715.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	88.154.857.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.988.964.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	8.972.963.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	172.522.056.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.593.638.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	61.022.580.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	32.415.651.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.350.088.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.036.455.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.443.202.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.315.153.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.671.740.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.149.891.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	3.673.500.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.049.747.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	13.215.779.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.207.761.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.376.871.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	471.276.665.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	141.347.070.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.225.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	227.141.010.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.553.799.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	10.624.080.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.493.186.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	618.831.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	33.383.876.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	612.951.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	15.625.967.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.431.175.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	16.619.720.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	600.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	273.359.772.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	273.359.772.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	273.359.772.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.708.372.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	14.708.372.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	14.708.372.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.691.883.989,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	173.691.883.989,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	173.691.883.989,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.971.574.448,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.540.364.145,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.190.175.260,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	497.394.996,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	68.492.375.140,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>100.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.993.553.209.614,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.291.787.756.005,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.286.630.941.970,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	788.484.314.133,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	594.645.653.547,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	467.791.101.606,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	126.854.551.941,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	56.033.970.235,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.633.348.543,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.400.621.692,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.957.529.991,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.957.529.991,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.891.232.560,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.891.232.560,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.831.210.002,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.101.090.002,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.730.120.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.539.679.440,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.991.190.960,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.548.488.480,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.484.783.820,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.455.089.820,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	29.694.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.066.256,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.425.351,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.640.905,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	37.493.222.423,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	34.028.223.623,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.464.998.800,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.339.148.120,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	963.431.280,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	375.716.840,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.945.912.520,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	3.133.653.720,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	812.258.800,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.306.905.219,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.528.499.960,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	778.405.259,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	224.000.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	154.889.624.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	145.453.344.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.436.280.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	257.040.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	257.040.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	68.853.336.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	68.853.336.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	232.959.479.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	227.141.010.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	227.141.010.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.553.799.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.553.799.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.264.670.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.264.670.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.584.017.549,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	179.971.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	179.971.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.468.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.468.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.183.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.183.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.503.272,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.503.272,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.035.671.488,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	123.302.296,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.492.192,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.877.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12.900.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.120.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.120.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.998.889,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.998.889,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.494.853.588,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.489.400,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.489.400,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.248.348,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.248.348,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.256.320,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.325.000.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	130.960.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	280.050.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	56.370.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	58.790.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	385.740.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	38.310.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	130.120.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	80.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	149.580.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.312.320.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	919.200.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	919.200.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.795.957.700,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.795.957.700,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	1.795.957.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.966.152.035,00
5.1.02.01	Belanja Barang	139.145.153.824,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	134.293.498.424,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	472.388.950,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	149.149.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.829.325.419,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	641.629.600,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	286.805.200,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	37.920.400,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	616.615.370,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.897.900,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	47.342.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.671.060.944,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.065.436.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.756.108.691,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	273.513.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.795.388.900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	805.031.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	260.086.200,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.904.834.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.505.633.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	256.600,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.870.050.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.336.964.130,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.394.405.100,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.806.530.120,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.103.698.900,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	64.211.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	148.145.600,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.582.072.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.311.800.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.199.607.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	120.075.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.289.150.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	436.950.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	145.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	882.881.500,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	174.316.800,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	105.257.400,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	14.656.500,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.981.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	62.321.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	562.443.400,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	562.443.400,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.289.212.000,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.675.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.503.600,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.989.600,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	450.000,00
5.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	900.000,00
5.1.02.01.04.0243	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.580.000,00
5.1.02.01.04.0248	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	1.800.000,00
5.1.02.01.04.0316	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.200.000,00
5.1.02.01.04.0323	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.882.325.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.128.800,00
5.1.02.01.04.0576	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.300.660.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	228.721.693.300,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	156.092.125.300,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.702.850.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.862.315.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.929.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	16.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.350.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	474.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17.415.180.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.585.931.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	124.616.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.596.020.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.072.875.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.826.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.371.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.993.195.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	324.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.615.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	143.660.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	40.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	390.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.046.937.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.188.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.169.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.574.914.700,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.703.660.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.654.655.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.541.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	188.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	563.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	11.143.200,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	67.050.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	991.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.982.120.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	5.100.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	48.100.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.227.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.248.524.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	359.965.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.056.077.400,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.042.763.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.351.993.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	176.000.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	26.500.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	40.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	749.550.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.909.640.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	14.040.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.034.031.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.298.041.600,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	34.405.644.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.296.086.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	300.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	755.586.628,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	898.672.372,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	80.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	29.000.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	29.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.859.269.000,00
5.1.02.02.04.0009	Belanja Sewa Loader	17.524.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	825.117.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	117.176.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	288.625.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.715.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	129.389.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	466.723.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.029.007.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	545.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	973.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.296.133.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	20.704.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	183.670.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	10.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	46.833.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.133.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.200.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	36.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.360.000.000,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	765.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.138.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	370.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.175.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.220.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	670.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.895.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	327.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.479.000.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	25.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.340.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	914.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.506.792.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.381.100.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.142.750.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.969.470.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.013.472.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	175.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	175.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	110.636.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	110.636.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.507.461.680,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.223.507.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	620.000.000,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.212.120.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	391.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	651.027.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	85.110.000,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	42.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.750.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	157.960.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	189.600.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	335.980.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	195.770.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	262.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.639.629.780,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.190.699.780,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	24.990.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	96.220.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	245.500.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	82.220.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.644.324.900,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	14.374.324.900,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	270.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	50.997.783.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.068.283.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.397.343.700,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.670.940.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	929.500.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	929.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.624.306.400,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.584.570.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.023.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	340.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	85.500.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.224.770.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	612.800.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	190.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	108.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.039.736.400,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.039.736.400,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.036.987.583,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.036.987.583,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	105.036.987.583,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	33.383.876.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	33.383.876.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	33.383.876.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	278.548.889.548,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	278.548.889.548,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	278.548.889.548,00
5.1.04	Belanja Subsidi	400.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	400.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	400.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	400.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	123.427.662.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	62.690.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	62.100.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	62.100.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	590.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	590.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.710.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.770.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.770.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.195.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.195.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.145.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.145.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	600.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	600.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	30.199.870.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	30.199.870.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	30.199.870.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.854.492.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.854.492.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.854.492.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	10.973.300.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	600.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	600.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	10.373.300.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	10.373.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.363.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.034.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.034.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.034.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.260.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.260.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.260.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.068.500.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.068.500.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.068.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>288.977.066.609,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.860.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.860.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	4.190.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.190.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.670.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.670.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.230.453.732,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	442.477.200,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	236.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	236.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	206.477.200,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	47.952.400,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	158.524.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.272.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.272.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.350.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.674.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.248.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	329.450.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	207.150.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	3.500.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	203.650.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	79.200.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	79.200.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	43.100.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	35.900.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	7.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.223.077.740,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.214.089.200,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.184.600,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.197.904.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.008.988.540,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.341.145.860,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	951.564.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	694.304.180,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	21.974.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	810.636.440,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	516.362.340,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	92.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	132.479.520,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	291.382.820,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	294.274.100,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	245.874.100,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	48.400.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.708.572.600,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.448.669.200,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.500.000.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	114.478.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	360.063.800,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.084.666.442,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.956.669.200,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	432.791.758,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.259.903.400,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.259.903.400,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.027.650.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.027.650.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.024.650.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.850.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	153.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.350.960.440,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.535.160.390,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.535.160.390,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	815.800.050,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	24.723.780,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	791.076.270,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	30.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	30.000.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	30.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	153.853.600,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	153.853.600,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	153.853.600,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	300.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	300.000.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	300.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.262.848.200,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.262.848.200,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.262.848.200,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.896.240,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.896.240,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.896.240,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.518.031.272,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.518.031.272,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.518.031.272,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.370.531.550,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	110.829.431.550,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.629.431.550,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.385.078.950,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	86.330.832.600,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	515.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	286.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.232.520.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	493.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	387.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	200.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	541.100.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	541.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	541.100.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.407.265.150,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.863.225.100,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	45.058.136.300,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	27.723.195.700,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	17.334.940.600,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.805.088.800,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.805.088.800,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.712.300.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.712.300.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.512.300.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	200.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	191.750.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	191.750.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	191.750.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	13.639.990.050,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	13.639.990.050,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	13.639.990.050,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.658.616.177,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	253.800.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	199.800.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	108.552.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	9.848.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	25.592.000,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	7.164.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	36.168.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	12.476.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	54.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	54.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.340.136.177,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.340.136.177,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.340.136.177,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	64.680.000,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	64.680.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	64.680.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.450.200.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.200.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	100.200.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.350.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.350.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	3.350.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>19.100.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.100.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	19.100.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	19.100.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	19.100.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>439.688.387.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	31.522.615.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	29.745.250.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	29.745.250.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	29.745.250.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.777.365.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.777.365.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.777.365.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	408.165.772.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	408.165.772.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	408.165.772.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	10.000.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	273.359.772.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	124.806.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.039.553.209.614,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-46.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	10.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	10.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>46.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sumedang, 29 Desember 2023

Pj Bupati



HERMAN SURYATMAN